

ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA PADEG KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK



PENULIS

Nama : Tiwi Yulis Tiarini
NIM : 1021910056

DOSEN PEMBIMBING

Alfiana Fitri, S.A., M.A

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada BUMDes Padeg. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu uji dependability. Metode yang digunakan pada teknik triangulasi yaitu Triangulasi Sumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* belum terlaksana sepenuhnya. Prinsip transparansi dan akuntabilitas belum berjalan dengan baik. Sedangkan prinsip responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan sudah berjalan dengan baik sesuai indikator. Upaya yang dilakukan berkaitan transparansi yaitu melakukan sosialisasi agar terciptanya pemahaman tentang pelayanan pada BUMDes Padeg. Sedangkan upaya yang dilakukan berkaitan akuntabilitas yaitu memberikan penyadaran dan motivasi terhadap masyarakat menuju kebangkitan sumber daya manusia

RUMUSAN MASALAH



Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMDes Desa Padeg?

METODE PENELITIAN



Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data wawancara dan dokumentasi

HASIL

Berdasarkan penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada BUMDes Padeg didapatkan bahwa pelaksanaan prinsip responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan telah dijalankan dengan baik sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Namun, terkait prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Tidak terpenuhinya penerapan dari prinsip tersebut berkaitan dengan sumber daya manusia sebagai pendukung dalam pengelolaan BUMDes pada prinsip akuntabilitas. Gaji karyawan yang tidak sesuai mengakibatkan karyawan mencari pekerjaan sampingan selain pada BUMDes dan menyebabkan kekurangan sumber daya manusia pada BUMDes Padeg. Ketersediaan sumber daya manusia yang cukup dan cakap akan membantu manajemen dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan.

KESIMPULAN

Governance yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Indonesia yang terdiri dari prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan belum diterapkan sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari prinsip akuntabilitas tidak memenuhi indikator.

- Prinsip akuntabilitas indikator pertama yaitu menetapkan rincian tanggung jawab organ perusahaan dan masing-masing karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai, dan strategi perusahaan belum terpenuhi karena terjadinya kekurangan sumber daya manusia yang menyebabkan banyaknya posisi organ BUMDes yang kosong dan belum terlaksanakan tanggung jawab dari masing-masing karyawan.
- Prinsip responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan sudah diterapkan sepenuhnya sesuai dengan indikator.

Upaya yang dilakukan pada prinsip akuntabilitas yang berkaitan dengan sumber daya manusia yaitu memberikan penyadaran dan motivasi terhadap masyarakat menuju kebangkitan sumber daya manusia. Dengan memberikan kesempatan untuk penerimaan karyawan tanpa melihat suku, ras, gender dan kondisi fisik diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa BUMDes benar-benar membutuhkan karyawan yang mampu untuk mengelola kegiatan BUMDes agar dapat memberdayakan potensi desa tersebut.